

## STRUKTUR KEPEMILIKAN, DEWAN KOMISARIS, DAN PENGUNGKAPAN PENGENDALIAN INTERNAL

Ivan Krisna Priantaka, Totok Dewayanto<sup>1</sup>

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to examine the effect of managerial ownership, institutional ownership, board of commissioners size, board of commissioners independence, and the number of board of commissioners meetings as independent variables on internal control disclosure as the dependent variable. This study uses company size as a control variable. This study uses secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX). This study used a sample of 226 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 2016 - 2017. The method used in this study was purposive sampling. The statistical technique used in this study is multiple linear regression. The results obtained from this study indicate that institutional ownership, board of commissioners size, board of commissioners independence, and the number of board of commissioners meetings have positive and significant effects on internal control disclosure. Managerial ownership does not have a significant effect on internal control disclosure.*

*Keywords: internal control disclosure, ownership structures, board of commissioners, corporate governance*

### PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-21, sebuah skandal akuntansi terungkap pada perusahaan besar Enron dan WorldCom di Amerika Serikat yang melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik yang termasuk dalam kategori Big 5 pada saat itu, yaitu KAP Arthur Andersen (Leng & Ding, 2011). Salah satu alasan penting yang melatarbelakangi terjadinya skandal akuntansi ini adalah adanya kegagalan dalam penerapan pengendalian internal perusahaan serta kurangnya pengungkapan informasi mengenai pengendalian internal oleh perusahaan (Agyei-Mensah, 2016; Leng & Ding, 2011). Skandal-skandal akuntansi yang terjadi ditanggapi oleh kongres Amerika Serikat dengan mengeluarkan *The Sarbanes-Oxley Act* (SOx) pada bulan Juli 2002 (Altamuro & Beatty, 2010). Terdapat dua bab atau *section* di dalam SOx yang berisi tentang pembahasan spesifik mengenai masalah sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, yaitu *section* 302 dan 404 (Zhang *et al.*, 2007). Setelah itu, beberapa negara mengikuti langkah Amerika Serikat dalam pengenalan pelaporan atau pengungkapan pengendalian internal, seperti Tiongkok, Jepang, dan Malaysia (Ahmad *et al.*, 2015; Cox, 2006; Leng & Ding, 2011; Nishizaki *et al.*, 2014).

Di Indonesia, regulasi yang mengatur mengenai hal-hal yang harus diungkapkan di dalam laporan tahunan perusahaan diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.04/2016 mengenai Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa pengungkapan mengenai sistem pengendalian internal perusahaan merupakan salah satu bagian dari pengungkapan tata kelola perusahaan. Pengungkapan pengendalian internal yang tercantum dalam surat edaran ini mencakup kontrol keuangan dan operasional, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tinjauan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan tersebut.

Pengendalian internal merupakan sebuah perangkat yang pada dasarnya dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dan memastikan reliabilitas pelaporan keuangan perusahaan (Hunziker, 2013). Pengungkapan mengenai sistem pengendalian internal perusahaan memiliki peran yang penting dalam mengurangi akibat dari masalah asimetri informasi dan biaya

---

<sup>1</sup> Corresponding author

---

keagenan di pasar, serta dapat menarik investasi langsung oleh asing (Agyei-Mensah, 2016). Apabila perusahaan mengungkapkan mengenai sistem pengendalian internalnya, *stakeholder* akan menjadi yakin terhadap reliabilitas laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan.

Pengungkapan pengendalian internal berkaitan erat dengan *corporate governance* (Agyei-Mensah, 2016). Apabila perusahaan menerapkan *corporate governance* dengan baik, mereka akan cenderung untuk melakukan penyajian informasi perusahaan yang esensial kepada para pemangku kepentingan supaya mampu mengurangi tingkat asimetri informasi (Agyemang *et al.*, 2013). Salah satu aspek esensial dari penyediaan informasi yang lengkap dan reliabel yang dianggap penting oleh pelaku keuangan adalah itu dapat membuktikan bahwa perusahaan memiliki pengendalian internal yang kuat (Agyei-Mensah, 2016). Penelitian ini menggunakan struktur kepemilikan saham perusahaan dan karakteristik dewan komisaris sebagai mekanisme *corporate governance*.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh struktur kepemilikan saham dan karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan keberagaman hasil penelitian, yaitu pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sukarela dan pengendalian internal (Dewayanto *et al.*, 2017; Donnelly & Mulcahy, 2008; Huafang & Jianguo, 2007; Hunziker, 2013; Owusu-Ansah & Ganguli, 2010), pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan pengendalian internal (Agyei-Mensah, 2016; Dewayanto *et al.*, 2017; Owusu-Ansah & Ganguli, 2010), pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan pengendalian internal (Agyei-Mensah, 2016; Hunziker, 2013; Leng & Ding, 2011; Owusu-Ansah & Ganguli, 2010), independensi dewan komisaris terhadap pengungkapan pengendalian internal (Agyei-Mensah, 2016; Ahmad *et al.*, 2015; Owusu-Ansah & Ganguli, 2010), dan pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap *voluntary disclosure* (Alhazaimeh *et al.*, 2014; Allegrini & Greco, 2013; Ferchichi & Skanji, 2017). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan pengendalian internal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 – 2017.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

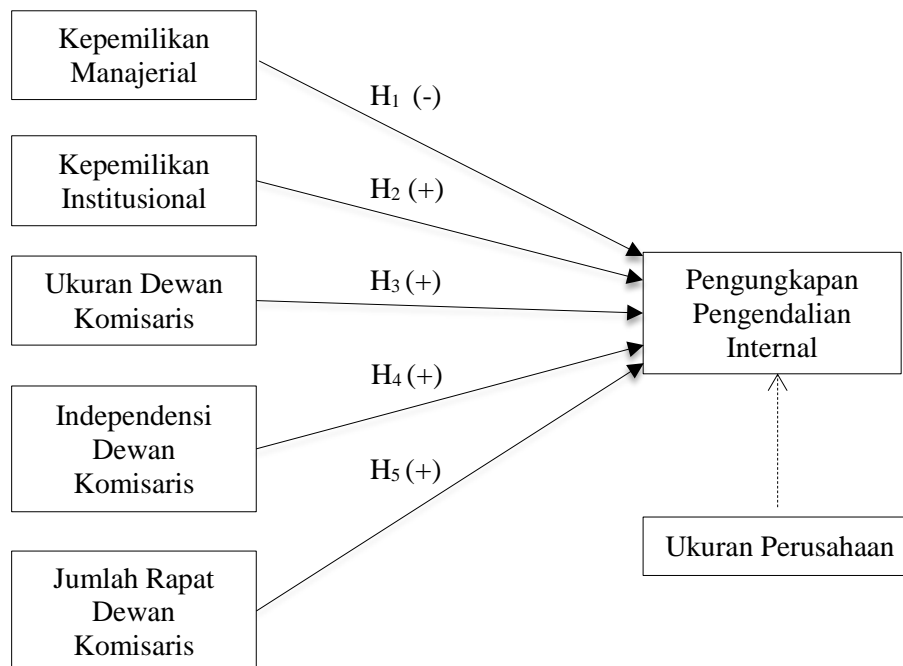
Model penelitian ini dikembangkan menurut teori keagenan. Definisi hubungan keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) ialah sebuah perikatan antara satu pihak (prinsipal) dengan pihak lain (agen) untuk mengerjakan pekerjaan atas nama mereka, termasuk di dalamnya menyerahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi dasar terhadap manusia, yaitu kecenderungan untuk mengutamakan kepentingannya sendiri, terbatasnya kemampuan akal manusia mengenai persepsi di waktu yang akan datang, dan kecenderungan manusia untuk melakukan penghindaran terhadap risiko. Masalah keagenan dapat terjadi ketika terdapat konflik kepentingan dan ketidaksamaan tujuan antara prinsipal dan agen, prinsipal mengalami kesulitan untuk memverifikasi setiap pekerjaan yang dilakukan agen, serta terdapat perbedaan sikap antara prinsipal dan agen dalam menghadapi risiko (Eisenhardt, 1989). Konflik kepentingan dapat terjadi ketika manajer, sebagai agen, memiliki akses yang tidak terbatas terhadap informasi perusahaan, sedangkan pemegang saham, sebagai prinsipal, tidak dapat mengevaluasi dan menilai keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajer karena keterbatasan informasi (Katarachia *et al.*, 2018).

Adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen mendorong munculnya biaya keagenan. Prinsipal dapat membatasi konflik tersebut melalui pemberian insentif yang layak kepada agen serta prinsipal juga dapat mengadakan biaya pengawasan untuk memperkecil kemungkinan adanya perilaku agen yang menyimpang. Biaya perikatan juga dapat diminta oleh prinsipal dari agen sebagai jaminan bahwa setiap keputusan yang diambil agen tidak akan membahayakan prinsipal. Terdapat juga kemungkinan adanya perbedaan di antara keputusan-keputusan agen yang mana keputusan tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan prinsipal. Penurunan kesejahteraan prinsipal karena perbedaan tersebut dinamakan sebagai kerugian residual. Tiga hal tersebut menggambarkan biaya keagenan untuk 3 jenis pengeluaran, yaitu biaya pengawasan, biaya perikatan, dan kerugian residual (Jensen & Meckling, 1976).

Perusahaan yang memiliki biaya keagenan yang tinggi akan berusaha untuk mengurangi biaya keagenan tersebut dengan meningkatkan pengungkapan sukarela dan dengan menggunakan

sebuah perangkat pengawasan yang intensif di dalam dewan komisaris (Agyei-Mensah, 2016). Transparansi dengan mengungkapkan pengendalian internal perusahaan dan berjalannya pengawasan oleh dewan komisaris memiliki peran yang penting dalam mengurangi konsekuensi dari biaya keagenan dan masalah asimetri informasi perusahaan (Agyei-Mensah, 2016).

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



Kerangka pemikiran penelitian pada gambar 1 menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dikembangkan menurut teori keagenan serta hasil penelitian terdahulu. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan pengendalian internal, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris. Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol.

### **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal**

Ditinjau dari teori keagenan, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial berdampak pada semakin rendahnya biaya keagenan karena adanya hubungan dengan insentif yang diterima manajer (Deumes, 2004). Apabila kepemilikan manajemen rendah, pemegang saham luar akan mengawasi perilaku manajer dengan lebih intensif untuk mengurangi konflik keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Manajemen yang memiliki saham sebuah perusahaan akan berdampak pada dualitas peran yang dijalankannya, yaitu peran sebagai prinsipal dan sebagai agen sekaligus. Dalam hal ini, pemilik saham dari manajemen akan lebih baik dalam mengurangi adanya konflik keagenan karena berkurangnya asimetri informasi perusahaan. Manajemen sebagai pemegang saham atau prinsipal akan cenderung tidak membutuhkan pengungkapan informasi yang lebih karena posisinya sebagai agen sudah memberinya informasi mengenai perusahaan.

Huafang & Jianguo (2007) dan Donnelly & Mulcahy (2008) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan kepemilikan manajerial atas pengungkapan sukarela. Penelitian Hunziker (2013) menunjukkan bahwa peningkatan pengungkapan pengendalian internal seiring dengan peningkatan kepemilikan manajerial. Sebaliknya, penelitian Owusu-Ansah & Ganguli (2010) dan Dewayanto *et al.* (2017) proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pengungkapan

pengendalian internal secara signifikan. Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini berhipotesis bahwa:

**H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.**

#### **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal**

Pemegang saham institusi memiliki dorongan lebih besar untuk mengawasi perilaku manajemen karena proporsi kepemilikan saham mereka relatif lebih besar dibandingkan pemegang saham individual (Jensen, 1993). Sebaliknya, pemegang saham berupa individu yang memiliki proporsi kepemilikan yang relatif kecil memiliki kemampuan yang cenderung lebih kecil untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi yang dapat membuat mereka mengawasi dan mengendalikan perilaku manajemen perusahaan (Stiglitz, 1985). Ditinjau dari teori keagenan, pemegang saham institusi berperan penting dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan karena kemampuan yang lebih besar untuk melakukan tindakan pengawasan tersebut. Selain itu, pemegang saham institusi juga cenderung memiliki hak suara mayoritas, sehingga mampu mengawasi tindakan manajemen secara lebih mendalam. Hal ini akan mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan pengendalian internal untuk mengurangi konflik keagenan.

Owusu-Ansah & Ganguli (2010) dan Agyei-Mensah (2016) tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari kepemilikan institusional atas pengungkapan pengendalian internal. Penelitian Dewayanto *et al.* (2017) menunjukkan hasil bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh institusi mampu mendorong pengungkapan pengendalian internal. Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini berhipotesis bahwa:

**H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.**

#### **Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal**

Fama & Jensen (1983) menyatakan bahwa tindakan pengawasan manajemen adalah fungsi yang paling penting dari dewan komisaris. Selain itu, semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan akan memperbesar kemampuannya dalam fungsi pengawasan dan pengendaliannya terhadap perilaku manajemen, sehingga manajemen akan terdorong untuk mengungkapkan informasi mengenai perusahaan secara lebih transparan (Gandia, 2008). Semakin besarnya ukuran dewan komisaris menunjukkan kemampuan dewan komisaris yang semakin baik dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap direksi dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat mendorong dewan komisaris untuk mengurangi asimetri informasi dengan mendorong adanya pengungkapan informasi oleh manajemen, seperti informasi pengendalian internal perusahaan.

Owusu-Ansah & Ganguli (2010) menemukan bahwa rendahnya ukuran dewan komisaris mampu meningkatkan pengungkapan pengendalian internal. Leng & Ding (2011) dan Agyei-Mensah (2016) menemukan bahwa pengungkapan pengendalian internal tidak dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris secara signifikan. Hunziker (2013) menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin besar pula pengungkapan pengendalian internalnya. Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini berhipotesis bahwa:

**H3 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.**

#### **Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal**

Teori keagenan menyatakan bahwa dewan komisaris independen mampu mengkontribusikan keahlian dan objektivitasnya untuk meminimalkan terjadinya perilaku oportunistik (Fama & Jensen, 1983). Penelitian-penelitian secara umum menyatakan bahwa independensi dewan komisaris adalah perangkat yang paling efektif untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas perusahaan (Ahmad *et al.*, 2015). Semakin besar proporsi dewan komisaris independen dalam dewan komisaris, maka semakin besar pula peran dewan komisaris terhadap pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas membutuhkan pengungkapan

informasi yang andal dari perusahaan, sehingga dewan komisaris independen akan cenderung melakukan tindakan untuk meningkatkan pengungkapan pengendalian internal perusahaan.

Penelitian Owusu-Ansah & Ganguli (2010) menemukan bahwa peningkatan pengungkapan pengendalian internal seiring dengan peningkatan proporsi komisaris independen. Mendukung hasil penelitian tersebut, Ahmad *et al.* (2015) dan Agyei-Mensah (2016) juga menemukan bahwa independensi dewan komisaris mampu mendorong pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini berhipotesis bahwa:

**H4 : Independensi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.**

#### **Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal**

Efektivitas kerja dewan komisaris tergantung pada aktivitas yang dilakukannya (Ferchichi & Skanji, 2017). Aktivitas dewan komisaris dapat didefinisikan dengan jumlah rapat yang dilakukannya (Alhazaimah *et al.*, 2014; Ferchichi & Skanji, 2017). Semakin besar jumlah rapat dewan komisaris akan menunjukkan semakin besarnya efektivitas kerja dewan komisaris. Dewan komisaris bertugas menjalankan fungsi pengawasan dalam perusahaan. Frekuensi rapat dewan komisaris yang tinggi dapat membuat fungsi pengawasannya lebih efektif, sehingga diharapkan dapat memperbanyak tindakan dalam pengungkapan pengendalian internal.

Penelitian Alhazaimah *et al.* (2014) tidak menemukan adanya pengaruh jumlah rapat dewan komisaris atas pengungkapan sukarela secara signifikan. Hal yang sama juga ditemukan oleh Ferchichi & Skanji (2017) yang menunjukkan pengungkapan sukarela tidak dipengaruhi oleh jumlah rapat dewan komisaris secara signifikan. Temuan Allegrini & Greco (2013) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris mampu mendorong pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini berhipotesis bahwa:

**H5 : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

#### **Pengungkapan Pengendalian Internal (ICDI)**

Variabel dependen pengungkapan pengendalian internal diukur menggunakan indeks terdiri dari 5 *item* yang merupakan komponen pengendalian internal yang dirumuskan oleh COSO, yaitu lingkungan pengendalian, evaluasi risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pengawasan (COSO, 2013). Indeks pengungkapan pengendalian internal dalam penelitian ini dihitung dengan:

$$\text{Internal Control Disclosure Index (ICDI)} = \frac{\sum_1^m d_i}{\sum_1^n d_i}$$

di mana:

$d_i$  = 1 apabila *item*  $d_i$  diungkapkan, 0 jika *item*  $d_i$  tidak diungkapkan;

$m$  = jumlah *item* yang diungkapkan oleh perusahaan; dan

$n$  = jumlah maksimal *item* pengungkapan.

#### **Kepemilikan Manajerial (MANOWN)**

Kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan yang dikendalikan oleh pihak manajerial perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan lain sebagainya (Dewayanto *et al.*, 2017). Pengukuran kepemilikan manajemen dilakukan dengan menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan (Hunziker, 2013).

#### **Kepemilikan Institusional (INSTOWN)**

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemegang saham institusi (Dewayanto *et al.*, 2017). Kepemilikan institusional diprosikan dengan mengakumulasikan persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham berupa institusi (Agyei-Mensah, 2016; Dewayanto *et al.*, 2017; Owusu-Ansah & Ganguli, 2010).

#### **Ukuran Dewan Komisaris (BOARDSIZE)**

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa dewan komisaris wajib mengawasi kebijakan dan jalannya pengelolaan perusahaan, serta memberikan nasihat pada direksi.

Ukuran dewan komisaris diproksikan dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Agyei-Mensah, 2016; Hunziker, 2013; Leng & Ding, 2011; Owusu-Ansah & Ganguli, 2010).

#### **Independensi Dewan Komisaris (BOARDIND)**

Dewan komisaris adalah sebuah instrumen perusahaan yang berkewajiban untuk mengawasi dan menasihati direksi, serta memastikan diterapkannya *good corporate governance* dalam perusahaan. Dewan komisaris juga diwajibkan untuk bertindak secara independen (KNKG, 2006). Independensi dewan komisaris diukur dengan perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Agyei-Mensah, 2016; Ahmad *et al.*, 2015; Owusu-Ansah & Ganguli, 2010).

#### **Jumlah Rapat Dewan Komisaris (BOARDMEET)**

Efektivitas kerja dewan komisaris tergantung pada aktivitas yang dilakukannya (Ferchichi & Skanji, 2017). Aktivitas yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat diproksikan dengan jumlah rapat yang dilakukannya (Alhazaimah *et al.*, 2014; Alnabsha *et al.*, 2018; Ferchichi & Skanji, 2017). Jumlah rapat dewan komisaris diukur dengan frekuensi rapat dewan komisaris dalam satu tahun (Alhazaimah *et al.*, 2014; Alnabsha *et al.*, 2018; Ferchichi & Skanji, 2017).

#### **Ukuran Perusahaan (FIRMSIZE)**

Pengungkapan yang dilakukan perusahaan memerlukan biaya-biaya langsung maupun tidak langsung. Adanya keterlibatan biaya tersebut menyebabkan terjadinya kecenderungan perusahaan-perusahaan besar lebih dapat mengungkapkan pengungkapan (Owusu-Ansah & Ganguli, 2010). Leng & Ding (2011) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar lebih cenderung mencurahkan sumberdayanya untuk pengembangan sistem pengendalian internal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan dan meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan (Ahmad *et al.*, 2015; Leng & Ding, 2011).

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016-2017. Periode tersebut dipilih karena adanya regulasi pengungkapan pengendalian internal yang dikeluarkan OJK melalui Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria:

1. Perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2016-2017.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan periode tahun 2016-2017.
3. Perusahaan menyajikan informasi-informasi mengenai struktur kepemilikan perusahaan dan karakteristik dewan komisaris yang dibutuhkan..

#### **Metode Analisis**

Keenam hipotesis diuji menggunakan regresi linear berganda dengan model sebagai berikut:

$$ICDI = \alpha + \beta_1 MANOWN + \beta_2 INSTOWN + \beta_3 BOARDSIZE + \beta_4 BOARDIND + \beta_5 BOARDMEET + \beta_6 FIRMSIZE + \varepsilon$$

di mana:

|               |   |
|---------------|---|
| ICDI          | : Indeks Pengungkapan Pengendalian Internal |
| $\alpha$      | : Konstanta                                 |
| $\beta$       | : Koefisien Regresi Variabel Independen     |
| MANOWN        | : Kepemilikan Manajerial                    |
| INSTOWN       | : Kepemilikan Institusional                 |
| BOARDSIZE     | : Ukuran Dewan Komisaris                    |
| BOARDIND      | : Independensi Dewan Komisaris              |
| BOARDMEET     | : Jumlah Rapat Dewan Komisaris              |
| $\varepsilon$ | : Error                                     |

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Sampel Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016–2017. Perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI pada periode tersebut adalah sebanyak 142 perusahaan. *Purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini dengan kriteria yakni perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan tahun 2016 dan 2017 serta perusahaan yang mengungkapkan data yang lengkap mengenai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria pengambilan sampel tersebut akan dieliminasi dari sampel penelitian. Ringkasan penentuan sampel penelitian dijelaskan pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Data Hasil Pemilihan Sampel Perusahaan**

| Kriteria Sampel Penelitian   | Jumlah |
|--|--------|
| Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI tahun 2016 – 2017                               | 142    |
| Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan tahunan pada tahun 2016 atau 2017 | (3)    |
| Perusahaan yang tidak mengungkapkan data informasi variabel independen dengan lengkap  | (22)   |
| Perusahaan yang memenuhi <i>purposive sampling</i>                                     | 117    |
| Perusahaan yang memenuhi <i>purposive sampling</i> dalam 2 tahun                       | 234    |
| Data <i>outlier</i>  | (8)    |
| Jumlah sampel penelitian   | 226    |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019.

Jumlah perusahaan yang memiliki kesesuaian dengan kriteria *purposive sampling* adalah sebanyak 117 perusahaan. Namun, terdeteksi data 4 perusahaan merupakan data *outlier*. Yang dimaksud dengan *outlier* ialah kasus data yang ada sebagai nilai ekstrim serta mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda jauh dari observasi yang lain (Ghozali, 2011). Setelah penghapusan data *outlier*, didapatkanlah 113 perusahaan sampel dalam 1 tahun, sehingga dalam 2 tahun terdapat sampel sebanyak 226 perusahaan.

### Statistik Deskriptif

**Tabel 2**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

|                       | <i>N</i> | <i>Minimum</i> | <i>Maximum</i> | <i>Mean</i> | <i>Std. Deviation</i> |
|-----------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| ICDI                  | 226      | 0,4            | 1,0            | 0,798       | 0,1423                |
| MANOWN                | 226      | 0,000          | 83,950         | 5,97812     | 15,008874             |
| INSTOWN               | 226      | 0,000          | 99,776         | 75,62739    | 24,463617             |
| BOARDSIZE             | 226      | 2              | 12             | 4,18        | 1,762                 |
| BOARDIND              | 226      | 28,571         | 100,00         | 41,46322    | 10,635555             |
| BOARDMEET             | 226      | 1              | 36             | 7,39        | 4,856                 |
| FIRMSIZE              | 226      | 25,216         | 33,320         | 28.58474    | 1,606475              |
| Valid N<br>(listwise) | 226      |                |                |             |                       |

Sumber: Output SPSS 20, data sekunder yang diolah, 2019.

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel dependen pengungkapan pengendalian internal (ICDI) memiliki nilai minimum sebesar 0,4. Nilai tersebut berarti bahwa nilai terendah pengungkapan pengendalian internal dalam penelitian ini sebesar 0,4, yaitu pengungkapan dari PT Delta Djakarta Tbk. pada tahun 2016, PT Prasadha Aneka Niaga Tbk. pada tahun 2016, PT Martina Berto Tbk. tahun 2016, PT Pyridham Farma Tbk. tahun 2017, serta PT Sekawan Intipratama Tbk. pada tahun 2016 dan 2017. Nilai maksimum variabel pengungkapan pengendalian internal (ICDI) menunjukkan nilai sebesar 1, di mana pengungkapan pengendalian internal memiliki nilai terbesar senilai 1, yaitu pengungkapan oleh 49 sampel penelitian, seperti PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. tahun 2016 dan 2017, PT Wijaya Karya Beton Tbk. tahun 2016 dan 2017, PT Astra Internasional Tbk. tahun 2016 dan 2017, PT Astra Otoparts Tbk. pada tahun 2016 dan 2017, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. tahun 2016 dan 2017, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. tahun 2016 dan 2017, PT Mustika Ratu Tbk. tahun 2016 dan 2017, serta PT Unilever Indonesia Tbk. tahun 2016 dan 2017. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,798 menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang masuk ke dalam sampel penelitian memiliki pengungkapan pengendalian internal yang tergolong tinggi. Nilai deviasi standar menunjukkan nilai sebesar 0,1423 yang berada di bawah nilai rata-rata, sehingga data pengungkapan pengendalian internal memiliki variasi yang rendah.

Variabel independen kepemilikan manajerial (MANOWN) menunjukkan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Rata-rata (*mean*) variabel independen ini adalah sebesar 5,978% dengan deviasi standar sebesar 15,009%. Lebih tingginya nilai deviasi standar dibandingkan nilai rata-rata berarti bahwa data kepemilikan manajerial memiliki variasi nilai yang tinggi. Nilai minimum variabel MANOWN sebesar 0,000% dimiliki oleh sebagian besar perusahaan yang termasuk dalam sampel perusahaan ini, yaitu sebanyak 112 sampel. Variabel ini memiliki nilai maksimum atau terbesar senilai 83,950% dimiliki oleh PT Jaya Pari Steel Tbk.

Variabel independen kepemilikan institusional (INSTOWN) adalah persentase kepemilikan saham perusahaan oleh pemegang saham institusi. Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase rata-rata (*mean*) variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 75,627% dan memiliki deviasi standar senilai 24,464%. Hal ini menunjukkan arti bahwa rata-rata 75,627% kepemilikan perusahaan sampel dipegang oleh institusi. Selain itu, lebih tingginya nilai rata-rata dibandingkan dengan nilai deviasi standarnya menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki variasi nilai yang rendah. Nilai minimum kepemilikan institusional sebesar 0% dimiliki oleh PT Saranacental Bajatama Tbk. Persentase kepemilikan institusional terbesar dalam sampel penelitian ini adalah sebesar 99,776% yang dimiliki oleh PT Citra Tubindo Tbk.

Variabel independen ukuran dewan komisaris (BOARDSIZE) adalah jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan sampel. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) ukuran dewan komisaris adalah sebanyak 4,18 atau 4 orang dengan deviasi standar sebesar 1,762. Hal tersebut berarti bahwa variasi nilai variabel ukuran dewan komisaris tergolong rendah. Jumlah dewan komisaris terendah dalam perusahaan sampel adalah sebanyak 2 orang yang dimiliki oleh PT Betonjaya Manunggal Tbk. pada tahun 2016 dan 2017, PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. pada tahun 2017, PT Ekadharma Internasional Tbk. pada tahun 2016 dan 2017, PT Asiaplast Industries Tbk. pada tahun 2016, PT Lotte Chemical Titan Tbk. pada tahun 2016 dan 2017, PT Impack Pratama Industri Tbk. pada tahun 2017, PT Tirta Mahakam Resources Tbk. pada tahun 2016 dan 2017, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. pada tahun 2016 dan 2017, PT Ateliers Mecaniques D'Indonesia pada tahun 2016 dan 2017, PT Siantar Top Tbk. pada tahun 2016 dan 2017, PT Langgeng Makmur Industri Tbk. pada tahun 2016 dan 2017, serta PT Selamat Sampoerna Tbk. dan PT Ever Shine Tex Tbk. pada tahun 2017. Jumlah dewan komisaris terbesar dimiliki oleh PT Astra International Tbk. pada tahun 2016 dan 2017. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh perusahaan sampel telah memenuhi UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa perseroan terbuka harus memiliki dewan komisaris sekurang-kurangnya sebanyak 2 orang.

Variabel independensi dewan komisaris (BOARDIND) merupakan perbandingan antara jumlah dewan komisaris independen dengan jumlah seluruh dewan komisaris. Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) persentase independensi dewan komisaris adalah sebesar 41,463% dengan standar deviasi senilai 10,635%. Lebih kecilnya nilai deviasi standar jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya menunjukkan bahwa variabel independensi dewan komisaris memiliki variasi nilai yang tergolong rendah. Persentase independensi dewan komisaris



terendah sebesar 28,571% dimiliki oleh PT Semen Indonesia Tbk. pada tahun 2016 dan 2017 serta PT Voksel Electric Tbk. pada tahun 2016. Independensi dewan komisaris tertinggi sebesar 100% dimiliki oleh PT Bentoel Internasional Investama Tbk. pada tahun 2017. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel telah mematuhi regulasi Bapepam-LK mengenai persyaratan persentase dewan komisaris independen sebanyak 30%, meskipun masih terdapat satu perusahaan sampel yang belum memenuhi persyaratan tersebut.

Variabel independen jumlah rapat dewan komisaris (BOARDMEET) adalah frekuensi rapat dewan komisaris perusahaan sampel dalam satu tahun. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) perusahaan sampel melaksanakan rapat dewan komisaris sebanyak 7,39 atau 8 kali dalam setahun dengan deviasi standar senilai 4,856. Lebih tingginya nilai rata-rata jika dibandingkan dengan deviasi standarnya menunjukkan bahwa variasi data variabel jumlah rapat dewan komisaris cenderung rendah. Perusahaan sampel yang melaksanakan rapat dewan komisaris paling sedikit adalah PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. pada tahun 2016 serta PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. pada tahun 2016 dan 2017, yaitu sebanyak 1 kali. Rapat dewan komisaris perusahaan sampel terbanyak dilakukan sebanyak 36 kali dalam setahun oleh PT Indal Aluminium Industry Tbk. pada tahun 2017. Luasnya rentang jarak nilai minimum dan nilai maksimum jumlah rapat dewan komisaris dapat terjadi karena tidak adanya regulasi dari OJK maupun regulator lainnya mengenai ketentuan jumlah rapat dewan komisaris perseroan terbuka.

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (FIRMSIZE) yang diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan sampel. Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata ukuran perusahaan sampel adalah 28,585 dengan nilai deviasi standar sebesar 1,606. Hal ini berarti bahwa variasi data ukuran perusahaan tergolong rendah. Perusahaan sampel terbesar adalah PT Astra International Tbk. dengan ukuran perusahaan sebesar 33,320 dengan total aset sejumlah Rp 295.645.986.422.784,00. Perusahaan sampel terkecil dengan ukuran perusahaan sebesar 25,216 dimiliki oleh PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk dengan total aset Rp 89.327.329.280,00.

### Hasil Regresi Linear Berganda

**Tabel 3**  
**Hasil Regresi Linear Berganda**

| Model |                         | Unstandardized |            | Standardized | t      | Sig.  |
|-------|-------------------------|----------------|------------|--------------|--------|-------|
|       |                         | Coefficients   |            | Coefficients |        |       |
|       |                         | B              | Std. Error | Beta         |        |       |
| 1     | (Constant)              | -0,129         | 0,173      |              | -0,743 | 0,458 |
|       | MANOWN                  | 0,000          | 0,001      | -0,043       | -0,536 | 0,592 |
|       | INSTOWN                 | 0,001          | 0,000      | 0,193        | 2,327  | 0,021 |
|       | BOARDSIZE               | 0,013          | 0,006      | 0,162        | 2,192  | 0,029 |
|       | BOARDIND                | 0,002          | 0,001      | 0,132        | 2,298  | 0,023 |
|       | BOARDMEET               | 0,003          | 0,002      | 0,116        | 2,026  | 0,044 |
|       | FIRMSIZE                | 0,024          | 0,007      | 0,273        | 3,625  | 0,000 |
|       | Adjusted R <sup>2</sup> | 0,288          |            |              |        |       |
|       | F hitung                | 16,142         |            |              |        |       |
|       | Sig.                    | 0,000          |            |              |        |       |

Sumber: Output SPSS 20, data sekunder yang diolah, 2019.

Tabel 3 menunjukkan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,288 yang berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dengan variabel kontrol dalam penelitian ini dalam menjelaskan pengungkapan pengendalian internal adalah sebesar 28,8%. Ini berarti bahwa 71,2% faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan pengendalian internal dijelaskan oleh variabel-variabel di luar penelitian ini. Nilai F sebesar 16,142 dengan tingkat signifikansi 0,000 berarti bahwa variabel independen dan kontrol penelitian ini mempengaruhi pengungkapan pengendalian internal secara simultan.

Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil pengujian pada tabel 3

menunjukkan bahwa nilai  $t$  untuk variabel independen kepemilikan manajerial (MANOWN) sebesar  $-0,536$  dengan tingkat signifikansi  $0,592$  sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hal ini berarti besar kecilnya pengungkapan pengendalian internal tidak dipengaruhi oleh persentase kepemilikan manajerial. Hasil temuan ini tidak mendukung penelitian Owusu-Ansah & Ganguli (2010) dan Dewayanto *et al.* (2017) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal, namun temuan ini konsisten hasil penelitian dari Huafang & Jianguo (2007) dan Donnelly & Mulcahy (2008) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Donnelly & Mulcahy (2008) menyatakan bahwa apabila pihak manajemen perusahaan telah memiliki saham perusahaan tersebut, terdapat kemungkinan bahwa kepentingan manajemen tersebut menjadi selaras dengan kepentingan pemegang saham lainnya sehingga mengakibatkan pihak manajemen terdorong untuk melakukan pengungkapan-pengungkapan mengenai perusahaan tersebut. Oleh karena itu, hasil yang diprediksi oleh teori keagenan dapat dikacaikan oleh selarasnya kepentingan pemegang saham manajemen dan pemegang saham lainnya. Ditinjau dari analisis statistik deskriptif pada tabel 2, dapat diketahui bahwa persentase kepemilikan manajerial perusahaan manufaktur Indonesia tahun 2016-2017 tergolong rendah, yaitu hanya sebesar  $5,978\%$ , sehingga dapat menjadi justifikasi bahwa persentase kepemilikan manajerial perusahaan-perusahaan sampel yang digunakan dalam penelitian ini tidak cukup mampu untuk menggambarkan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan pengendalian internal. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 1 (H1) ditolak**.

Hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Uji statistik  $t$  pada tabel 3 menunjukkan nilai  $t$  variabel kepemilikan institusional (INSTOWN) sebesar  $2,327$  dengan tingkat signifikansi  $0,021$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional (INSTOWN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hal ini berarti bahwa pengungkapan pengendalian internal dapat didorong oleh besarnya persentase kepemilikan institusional. Hasil penelitian ini mendukung temuan dari Dewayanto *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Berdasarkan hasil uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis dua (H2) diterima**.

Hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil uji signifikansi parameter individual pada tabel 3 menunjukkan nilai  $t$  variabel ukuran dewan komisaris (BOARDSIZE) sebesar  $2,192$  dengan tingkat signifikansi  $0,029$  yang berarti bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hal ini berarti bahwa besarnya ukuran dewan komisaris mampu mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi pengendalian internal perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hunziker (2013) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Berdasarkan hasil uji tersebut, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis tiga (H3) diterima**.

Hipotesis 4 (H4) menyatakan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil uji statistik  $t$  pada tabel 3 menunjukkan bahwa variabel independensi dewan komisaris (BOARDIND) memiliki nilai  $t$  sebesar  $2,298$  dan signifikansi sebesar  $0,023$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independensi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hal ini berarti bahwa besarnya proporsi komisaris independen akan mendorong pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Owusu-Ansah & Ganguli (2010), Ahmad *et al.* (2015), dan Agyei-Mensah (2016) yang menemukan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis empat (H4) diterima**.

Hipotesis lima (H5) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil uji statistik  $t$  menunjukkan nilai  $t$  variabel jumlah rapat dewan komisaris (BOARDMEET) sebesar  $2,026$  dengan

signifikansi sebesar 0,044 sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil ini berarti bahwa banyaknya jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris akan mendorong pengungkapan pengendalian internal perusahaan. Temuan ini konsisten dengan hasil temuan dari Allegrini & Greco (2013) yang menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap *voluntary disclosure*. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis lima (H5) diterima**.

Variabel kontrol ukuran perusahaan (*FIRMSIZE*) menunjukkan nilai *t* sebesar 3,625 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, sehingga variabel kontrol ukuran perusahaan (*FIRMSIZE*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.

## KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan pengendalian internal dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, maka simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.
2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.
3. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.
4. Independensi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.
5. Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengendalian internal.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen mengenai mekanisme *corporate governance* yang terbatas pada struktur kepemilikan dan karakteristik dewan komisaris perusahaan.
2. Sampel penelitian ini terbatas pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu yang pendek yaitu pada tahun 2016-2017.
3. Sebanyak 112 data mengenai variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai sebesar 0% sehingga penelitian ini mungkin belum dapat menggambarkan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan pengendalian internal.

### Saran Penelitian

Berdasarkan hasil serta keterbatasan dalam penelitian ini, saran-saran yang dapat penulis berikan untuk peneliti-peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Menambah variabilitas variabel independen yang berkaitan dengan mekanisme *corporate governance* di luar model penelitian ini yang dapat mempengaruhi pengungkapan pengendalian internal, seperti karakteristik komite audit.
2. Menambah sampel penelitian di luar perusahaan manufaktur sehingga mampu memberikan gambaran lebih lanjut mengenai praktik pengungkapan pengendalian internal di Indonesia.
3. Menambah kriteria dan klasifikasi *sampling* sehingga data kepemilikan manajerial mampu menggambarkan pengaruhnya terhadap pengungkapan pengendalian internal secara lebih akurat.

## REFERENSI

- Agyei-Mensah, B. K. 2016. Internal control information disclosure and corporate governance: evidence from an emerging market. *Corporate Governance* 16 (1):79-95.
- Agyemang, O. S., E. Aboagye, & A. Y. O. Ahali. 2013. Prospects and Challenges of Corporate Governance in Ghana. *International Journal of Scientific and Research Publications* 3 (5):1-9.
- Ahmad, R. A. R., N. Abdullah, N. E. S. M. Jamel, & N. Omar. 2015. Board Characteristics and Risk Management and Internal Control Disclosure Level: Evidence from Malaysia. *Procedia Economics and Finance* 31 (2011):601-610.
- Alhazaimeh, A., R. Palaniappan, & M. Almsafir. 2014. The Impact of Corporate Governance and Ownership Structure on Voluntary Disclosure in Annual Reports among Listed Jordanian Companies. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 129:341-348.
- Allegrini, M., & G. Greco. 2013. Corporate boards, audit committees and voluntary disclosure: evidence from Italian Listed Companies. *Journal of Management and Governance* 17 (1):187-216.
- Alnabsha, A., H. A. Abdou, C. G. Ntim, & Ahmed Ahmed Elamer. 2018. Corporate Boards, Ownership Structures and Corporate Disclosures: Evidence from a Developing Country. *Journal of Applied Accounting Research* 19 (1):20-41.
- Altamuro, J., & A. Beatty. 2010. How does internal control regulation affect financial reporting? *Journal of Accounting and Economics* 49 (1-2):58-74.
- COSO. 2013. The 2013 COSO Framework & SOx Compliance, edited by J. S. McNally. North Carolina, 9.
- Cox, C. *Testimony Concerning The Impact of the Sarbanes-Oxley Act* 2006 [cited. Available from <https://www.sec.gov/news/testimony/2006/ts091906cc.htm>].
- Deumes, R. 2004. Voluntary Reporting on Internal Control by Listed Dutch Companies. Maastricht: Maastricht University.
- Dewayanto, T., D. Suhardjanto, Bandi, & I. Setiadi. 2017. Ownership Structure, Audit Committee, and Internal Control Disclosure: Indonesia and Philippines. *Review of Integrative Business and Economics Research* 6 (4):353-363.
- Donnelly, R., & M. Mulcahy. 2008. Board Structure, Ownership, and Voluntary Disclosure in Ireland. *Corporate Governance* 16 (5):416-429.
- Eisenhardt, K. M. 1989. Agency Theory: An Assessment Review. *The Academy of Management Review* 14 (1):55-74.
- Fama, E. F., & M. C. Jensen. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics* 26 (2):301-325.
- Ferchichi, J., & M. Skanji. 2017. Audit Committee and Board Effectiveness against Voluntary Disclosure in the Pre and Post Enactment of the Tunisian Central Bank Circular n°2011-06 of Good Governance Practices. *International Research Journal of Finance and Economics* (159):27-45.



- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. 5 ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Huafang, X., & Y. Jianguo. 2007. Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure: Evidence from listed companies in China. *Managerial Auditing Journal* 22 (6):2007.
- Hunziker, S. 2013. Internal Control Disclosure and Agency Costs - Evidence from Swiss listed non-financial Companies. Zug: Lucerne University of Applied Sciences, 1-21.
- Jensen, M. C., & W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4):305-360.
- Jensen, M. J. 1993. The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance* 48 (3):831-880.
- Katarachia, A., E. Pitoska, G. Giannarakis, & E. Poutoglidou. 2018. The drivers of corporate governance disclosure: the case of Nifty 500 Index. *International Journal of Law and Management* 7 (1):63-83.
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Leng, J., & Y. Ding. 2011. Internal Control Disclosure and Corporate Governance: Empirical Research from Chinese Listed Companies. *Technology and Investment* 02 (04):286-294.
- Nishizaki, R., Y. Takano, & F. Takeda. 2014. Information Content of Internal Control Weaknesses: The Evidence from Japan. *The International Journal of Accounting* 49 (1):1-26.
- Owusu-Ansah, S., & G. Ganguli. 2010. Voluntary Reporting on Internal Control Systems and Governance Characteristics: An Analysis of Large U.S. Companies. *Journal of Management Issues* 22 (3):383-408.
- Stiglitz, J. E. 1985. Credit Markets and the Control of Capitals. *Journal of Money, Credit and Banking* 17 (2):133-152.
- Zhang, Y., J. Zhou, & N. Zhou. 2007. Audit committee quality, auditor independence, and internal control weaknesses. *Journal of Accounting and Public Policy* 26 (3):300-327.